

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi

Oleh:

***) Nurdin. S.E., M.E.**

***) Hasan Basri, S.E., M.Si.**

****)Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kontribusi sumber-sumber penerimaan PAD terhadap total PAD Kota Jambi (2) tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Jambi.

Hasil penelitian antara lain menyimpulkan bahwa Struktur PAD Kota Jambi menunjukkan pajak daerah memberikan peran yang besar (57,10%) dalam pembentukan PAD. Dilihat dari struktur komposisi APBD, peran PAD dalam membiayai belanja daerah masih sangat kecil yaitu 11,30%, Daerah belum mandiri dalam membiayai sendiri belanja daerahnya..Indek Kemampuan Keuangan Kota Jambi dari tahun ketahun mengalami peningkatan ini menunjukkan terjadi peningkatan kemampuan keuangan daerah. Tingkat Kemandirian keuangan daerah rendah sekali (tidak mampu), dengan pola hubungan instruktif. Artinya kemampuan PAD dalam pendanaan pembangunan belum mampu untuk berotonomi, masih sangat tergantung pada dana transfer. Tingkat ketergantungan fiskal sangat besar berarti kinerja anggaran sangat buruk sekali, Diasumsikan pemerintah daerah belum mampu membiayai belanjanya sendiri.

Kata Kunci : PAD, Indek Kemampuan Keuangan.

Latar Belakang

Otonomi daerah membawa konsekuensi pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendukung peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi daerahnya sendiri dan menggali sumber dana yang ada dan potensial guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemandirian dalam berotonomi. Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Rendahnya PAD merupakan

indikasi nyata dimana masih besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Sama halnya dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah Kota Jambi yang merupakan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya adalah PAD. Untuk itu diperlukan metode perhitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional dimana PAD Kota Jambi sebagai indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kota Jambi.

Secara garis besar tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Jambi sebagai daerah otonom, dapat dilihat dari persentase sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2014 PAD Kota Jambi terealisasi sebesar Rp.175.133juta,- sedangkan total pendapatan daerah sebesar Rp. 1.220.463 juta,- atau komposisi PAD terhadap total penerimaan sebesar 14,3% ini menunjukkan bahwa Kota Jambi masih sangat tinggi tingkat ketergantungannya pada dana dari pusat, yang berarti tingkat kemandirian daerah masih jauh dari harapan.

Keragaman potensi sumber penerimaan daerah menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penerimaan PAD, hal ini perlu diminimalisir sehingga perlu untuk menganalisis kemampuan keuangan. Sehingga penulis memandang perlu dilakukan pengkajian secara mendalam mengenai kemampuan keuangan daerah Kota Jambi , yaitu analisis kemampuan keuangan daerah Kota Jambi.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kontribusi sumber-sumber penerimaan PAD terhadap total PAD, kontribusi sumber-sumber penerimaan APBD terhadap total APBD di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Jambi

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah

(*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dan usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 serta PP No.150 tahun 2000, sumber-sumber penerimaan dapat diperinci sebagai berikut :

- a. PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber PAD terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah ada 2 yaitu :

- a) Pajak daerah yang dipungut propinsi, meliputi: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b) Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota meliputi: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.

3) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-Lain PAD yang Sah

Meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa oleh daerah.

b. Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi

Desentralisasi Fiskal (dalam otonomi daerah) ditujukan untuk menciptakan kemandirian daerah. Sidik, (2002) menyatakan bahwa dalam era ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi (keuangan lokal), khususnya pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat mengingat ketergantungan semacam ini akan mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah dalam era otonomi sangat besar, karena pemerintah daerah dituntut kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya dan melakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerahnya.

Upaya peningkatan (pertumbuhan) PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada. Peningkatan PAD melalui kedua

penerimaan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik. Kenyataan menunjukkan kualitas layanan publik masih banyak yang memprihatinkan, akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon secara negatif. Hal ini berarti peningkatan kemandirian ini tidak akan mungkin terjadi apabila tidak terjadi peningkatan peran serta masyarakat yang tercermin dalam pembayaran pajak ataupun retribusi.

Hasil penelitian Deddyk, (2003) menunjukkan adanya peningkatan PAD di seluruh Propinsi dalam era otonomi daerah. Lewis,(2003) menemukan hal yang sama, yaitu terjadi peningkatan PAD, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Susilo, (2007) menemukan hal yang sama adanya peningkatan PAD pada kabupaten dan Kota di Jawa-Tengah. Peningkatan PAD ini disebabkan karena meningkatnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini memberikan indikasi adanya upaya yang keras dari daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal yang sangat mengandalkan kontribusi langsung masyarakat (untuk membayar). Namun demikian, pemerintah daerah harus mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap upaya peningkatan PAD ini.

Eksploitasi pajak secara berlebihan justru akan dapat menyebabkan masyarakat semakin terbebani, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro. Akibatnya bukan peningkatan PAD yang terjadi tetapi justru sebaliknya. Lewis, (2003) menemukan bahwa dalam era otonomi ini, pemerintah daerah sangat agresif dalam mengeluarkan produk-produk perundangan terkait dengan pajak maupun retribusi daerah.

Upaya peningkatan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah akan berhasil bila pemerintah daerah menunjukkan itikad yang sungguh untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Peningkatan pelayanan publik ini tercermin dengan meningkatnya proporsi belanja pembangunan. Yang memberikan bukti empiris adanya kenaikan pajak ketika pemerintah menaikkan belanja pembangunan untuk sektor industri.

Seiring dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian pemerintah Daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD (share) untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil. Senada dengan hal ini, Bappenas menyatakan bahwa dalam era otonomi seharusnya peran PAD semakin besar

dalam membiayai berbagai belanja daerah. Seiring dengan peningkatan (pertumbuhan) meningkatnya pemberian pelayanan publik, diharapkan kontribusi masyarakat semakin meningkat pula, penerimaan PAD menjadi semakin tinggi. Kontribusi pemerintah pusat semakin menurun, seiring dengan meningkatnya kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD-nya.

METODE ANALISIS

1. Struktur PAD dan APBD

Struktur PAD untuk melihat komposisi apa saja yang dominan dalam menyumbang PAD, adapun komposisi PAD terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Struktur PAD dapat dilihat dari seberapa besar masing-masing komponen penyumbang PAD. Dapat digunakan rumus

$$\text{Rasio Komposisi PAD} = \frac{N}{T} \frac{K_i}{P} \frac{P}{P} \times 100\%$$

Struktur APBD untuk melihat komposisi apa saja yang dominan dalam menyumbang APBD, adapun komposisi APBD terdiri dari : PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Struktur APBD dapat dilihat dari seberapa besar masing-masing kompenen menyumbang APBD, dapat digunakan rumus :

$$\text{Rasio Komposisi APBD} = \frac{N}{T} \frac{K_i}{A} \frac{A}{A} \times 100\%$$

2. Guna melakukan pengukuran kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah digunakan formasi :

a. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan rata-rata hitung dari Indeks Pertumbuhan (*Growth*), Indeks Elastisitas, dan Indeks *Share*. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Menyusun indeks untuk setiap komponen IKK dilakukan dengan menggunakan persamaan umum (Deddyk, 2003)

$$\text{Indeks X} = \frac{N}{N} \frac{X_{ha}}{X_k} \frac{p}{m} - \frac{N}{N} \frac{X_k}{X_k} \frac{m}{m}$$

Berdasarkan persamaan diatas maka persamaan IKK dapat ditulis sebagai berikut :

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

Keterangan:

IKK = Indeks Kemampuan Keuangan

X_G = Indeks Pertumbuhan (PAD)

X_E = Indeks Elastisitas (Pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan APBD)

X_S = Indeks *Share* (PAD terhadap APBD)

Nilai IKK diurut dimulai dari yang mempunyai kemampuan keuangan terbesar, mempunyai kemampuan keuangan *sedang*, Dan mempunyai kemampuan keuangan *rendah*.

Tingkat kemandirian daerah

TKD = —

Keterangan :

TKD = Tingkat kemandirian daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPT = Total penerimaan transfer

Pola hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut.

1. *Instruktif*
2. *Konsultatif*
3. *Partisipatif*
4. *Deligatif*

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
≤ 25	Rendah Sekali	Daerah dianggap tidak mampu.	Instruktif
25 – 50	Rendah	Daerah dianggap kurang mandiri.	Konsultatif
51 – 75	Sedang	Daerah dianggap cukup mandiri.	Partisipatif
76 - 100	Tinggi	Daerah dianggap sudah mandiri.	Deligatif

b. Tingkat Ketergantungan daerah

$$TKtD = \frac{PT}{TPD}$$

Keterangan :

TKtD = Tingkat ketergantungan daerah

PT = Penerimaan transfer

TPD = Total penerimaan daerah

Nilai rasio (%)	Kesimpulan
≤ 25	Ketergantungan fiskal dinyatakan sangat kecil berarti kinerja anggaran sangat baik.
25 – 50	Ketergantungan fiskal dinyatakan cukup baik, yang berarti kinerja anggaran cukup baik.
51 – 75	Ketergantungan fiskal dinyatakan cukup besar yang berarti kinerja anggaran kurang baik.
76 – 100	Ketergantungan fiskal dinyatakan sangat besar yang berarti kinerja anggaran sangat buruk sekali.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Komposisi PAD dan APBD

1.1 Struktur Komposisi PAD

Struktur Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk melihat seberapa besar setiap komposisi memberikan andil dalam menyumbang pendapatan asli daerah, agar dapat diketahui komposisi apa yang belum maksimal digali sehingga PAD dapat tumbuh sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda dalam menggali pendapatannya, sesuai dengan keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki masing-masing daerah. Pemerintahan daerah akan secara maksimal berusaha mencari sumber-sumber pendapatan yang baru dan meningkatkan pendapatan yang ada. Adapun struktur komposisi PAD Kota Jambi tahun 2009 s/d 2013 seperti tabel 5.1.

Tabel 5.1. Struktur komposisi PAD Kota Jambi tahun 2005 – 2014 (Juta Rp)

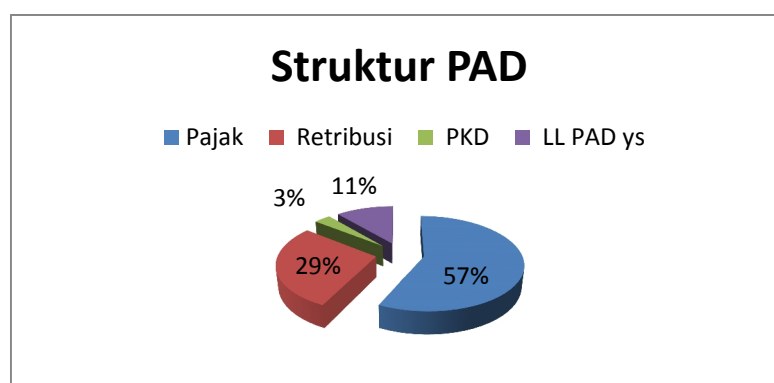
No	Tahun	Pajak	Retribusi	PKD *	LL PAD ys**	PAD
1	2005	17.222	15.040	758	2.926,71	35948
2	2006	19.254	16.609	832	6.628,05	43323
3	2007	20582	17.310	1147	6485,70	45525
4	2008	28842	18.309	2786	5734,71	55671
5	2009	27064	32482	2786	5774	68.105
6	2010	46060	22985	2786	6525	78.355
7	2011	59570	22.224	5.472	11.734	99000
8	2012	73345	22.936	2.950	13.859	113090
9	2013	91477	37.170	4.389	16.007	149042
10	2014	109472	40.381	4.000	21.280	175133
	Rata	49289	24.545	2.790	9.695	86.319
	%	57,10	28,43	3,23	11,23	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Data diolah

* : PKD = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

** : LL PAD ys = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan tabel 5.1. diketahui bahwa struktur komposisi PAD Kota Jambi dari tahun 2005 hingga 2014 selalu mengalami peningkatan. Jika dilihat dari penyebaran komposisi, yang memiliki rata-rata kontribusi terbesar pada PAD Kota Jambi adalah pajak daerah sebesar 57,10%; diikuti oleh retribusi daerah sebesar 28,43% terbesar ketiga adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 11,23% dan yang terkecil kontribusinya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,23%.



Gambar 3.
Struktur Komposisi PAD Kota Jambi tahun 2005 – 2014

1.2 Struktur Komposisi APBD

Struktur Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk melihat seberapa besar setiap komposisi memberikan andil dalam menyumbang APBD, agar dapat diketahui seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai sendiri belanja daerahnya, Serta seberapa besar tingkat ketergantungan daerah kepada dana Perimbangan.

Setiap daerah memiliki variasi masing-masing dalam membiayai belanja APBD sesuai kemampuan daerah dan besarnya dana transfer baik dari pusat maupun provinsi. Adapun proporsi dari masing-masing komposisi APBD Kota Jambi adalah seperti tabel 5.2.

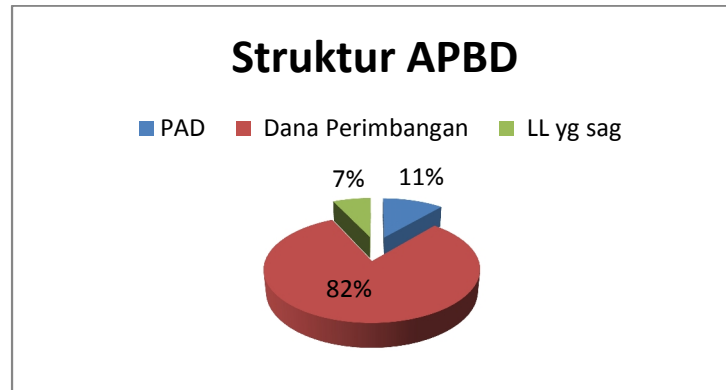
Tabel 5.2. struktur komposisi APBD Kota Jambi tahun 2005 s/d 2014 (Juta Rp.)

No	Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang sah	Total Pendapatan
1	2005	35.948	279.976	18.746	334.670
2	2006	43.323	400.017	23.141	466.481
3	2007	45.525	455.408	21.906	522.838
4	2008	55.671	501.409	51.475	608.555
5	2009	68.105	498.424	36.821	603.350
6	2010	78.355	571.023	116.944	766.321
7	2011	99.000	765.781	5.186	869.967
8	2012	113.090	903.954	66.873	1.083.917
9	2013	149.042	1.005.079	10.232	1.164.353
10	2014	175.133	857.255	188.076	1.220.463
Rata-rata		86.319	623.832	53.940	764.091
Persentase		11,30	81,64	7,06	100

Sumber : Badan Pusat StatistikData diolah

Berdasarkan tabel, diketahui komposisi PAD rata-rata selama kurun waktu 2005 – 2014 dalam menyumbang APBD di Kota Jambi sebesar 11,30% artinya kemampuan keuangan Kota Jambi rendah sekali. Sementara persentase dana perimbangan sebesar 81,64% ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan Kota Jambi dalam membiayai belanjanya terhadap dana perimbangan, dan ini menunjukkan bahwa Kota Jambi belum mampu mandiri seperti yang diharapkan dalam otonomi daerah. Dan untuk lain-lain pendapatan yang sah sebesar 7,06%. Hal ini menuntut pemerintah daerah Kota Jambi harus mampu untuk terus meningkatkan

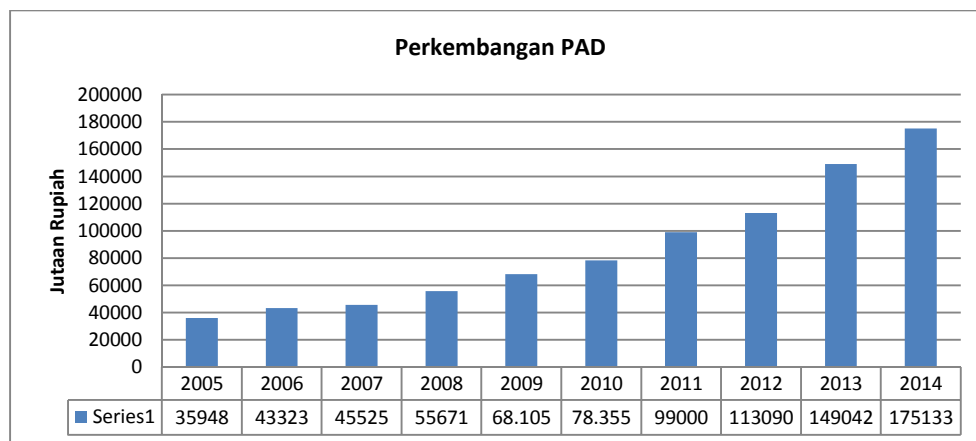
PAD dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan yang baru dan merevisi ulang sumber pendapatan yang sudah ada.



Gambar 4
Struktur Komposisi APBD Kota Jambi tahun 2005 – 2014

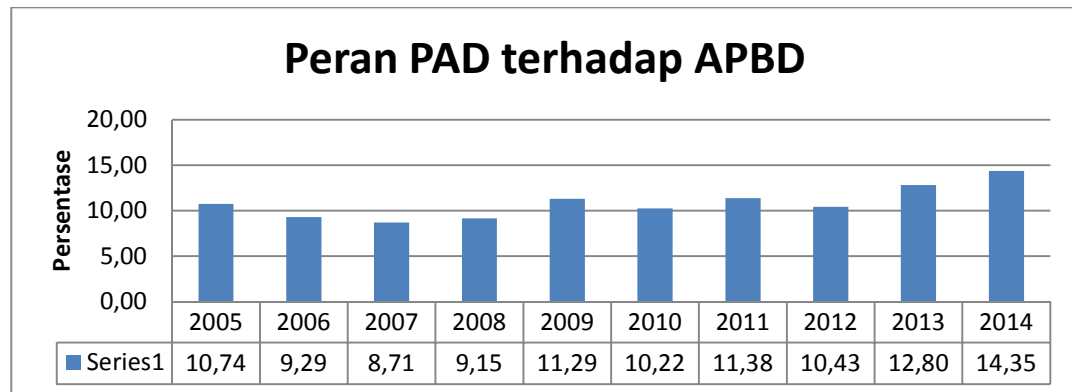
1.3 Perkembangan dan Peran PAD terhadap APBD

Setelah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan pada tingkat Kota, terjadi perkembangan terus menerus terhadap PAD Kota Jambi. Yang mana pada tahun 2005 PAD sebesar Rp.35.948 juta, naik menjadi Rp. 45.525 juta, pada tahun 2007, dan naik menjadi Rp. 78.355 juta, pada tahun 2010, kemudian naik menjadi Rp.113.090 juta, pada tahun 2012, dan pada tahun 2014 naik menjadi Rp.175.133 juta, seperti pada Gambar 5



Gambar 5
Perkembangan PAD Kota Jambi periode tahun 2005 – 2014

Kalau dilihat dari peran PAD dalam membiayai APBD Kota Jambi, terlihat terjadi fluktuasi dari tahun ketahun peran PAD terhadap APBD, yang mana peran PAD tahun 2005 sebesar 10,74% dari APBD; peran PAD tahun 2007 turun menjadi 8,71% dari APBD; peran PAD tahun 2009 naik kembali menjadi 11,29% dari APBD; peran PAD tahun 2012 kembali turun menjadi 10,43% dari APBD; dan peran PAD tahun 2014 naik menjadi 14,35% dari APBD.



Gambar 6
Peran PAD dalam APBD Kota Jambi periode tahun 2005 - 2014

1.4 Kemampuan Keuangan Daerah

Jika Kinerja keuangan daerah dikaitkan dengan Pertumbuhan ekonomi daerah, maka salah satu hal yang penting diperhatikan adalah bahwa anggaran belanja pemerintah daerah seharusnya menjadi simultan pertumbuhan ekonomi daerah, seharusnya pertumbuhan PAD sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga perlunya prioritas kebijakan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang lebih menekankan pada upaya peningkatan PAD secara langsung. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah adalah dengan menaikkan alokasi belanja modal setiap tahunnya agar fungsi anggaran pemerintah daerah sebagai simultan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud.

1.4.1.1 Metode Indeks

Metode Indek Kemempuan Keuangan (IKK) ialah suatu metode guna melihat status kemampuan keuangan berdasarkan *Growth*, *Share* dan *Elastisity*.

Tabel 5.3. *Growth*, *Share* dan *Elasticity* Kota Jambi periode 2005 s/d 2014

No	Tahun	<i>Growth</i> (%)	<i>Share</i> (%)	<i>Elasticity</i> (%)
1	2005	11,871	10,741	1,061
2	2006	20,518	9,287	0,521
3	2007	5,081	8,707	0,421
4	2008	22,288	9,148	1,360
5	2009	22,334	11,288	-26,111
6	2010	15,050	10,225	0,557
7	2011	26,348	11,380	1,948
8	2012	14,232	10,433	0,579
9	2013	31,791	12,800	4,284
10	2014	17,506	14,350	3,633

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 5.3. diketahui bahwa *growth* Kota Jambi yang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 31,791; dan yang terendah pada tahun 2007 sebesar 5,081: *Share* tertinggi pada tahun 2014 sebesar 14,350; dan yang terendah pada tahun 2007 sebesar 8,707: Dan *Elasticity* yang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 4,284; dan yang terendah pada tahun 2009 sebesar -26,111:

Dengan metode IKK, akan diketahui status kemampuan keuangan dari tahun ke tahun dan dapat melihat peringkat kemampuan keuangan per tahun. Dalam IKK akan membagi kemampuan keuangan menjadi tiga status kemampuan keuangan yaitu IKK Tinggi, IKK Sedang dan IKK Rendah.

Tabel 5.4. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Kota Jambi tahun 2005 s/d 2014

No	TAHUN	INDEK KEMAMPUAN KEUANGAN	STATUS KEMAMPUAN KEUANGAN
1	2013	0,908	TINGGI
2	2014	0,815	
3	2011	0,731	
4	2008	0,542	SEDANG
5	2006	0,519	
6	2010	0,507	
7	2005	0,503	
8	2009	0,368	RENDAH
9	2007	0,291	
10	2012	0,216	

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa Indek Kemampuan Keuangan tinggi pada tahun 2013 dengan IKK 0,908; diikuti tahun 2014 dengan IKK 0,815; dan

tahun 2011 dengan IKK 0,731; Untuk Indek Kemampuan Keuangan sedang terjadi pada tahun 2008 dengan IKK 0,542; diikuti tahun 2006 dengan IKK 0,519; tahun 2010 dengan IKK 0,503; dan tahun 2005 dengan IKK 0,503; Serta Indek Kemampuan Keuangan rendah terjadi pada tahun 2009 dengan IKK 0,368; diikuti tahun 2007 dengan IKK 0,291; terakhir pada tahun 2012 dengan IKK 0,216:

1.4.1.2 Tingkat kemandirian daerah

Tingkat Kemandirian daerah atau rasio kemandirian daerah memperlihatkan kesiapan daerah dalam berotonomi atau kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya khususnya dari sumber penerimaan PAD dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Analisis Kemandirian Daerah Kota Jambi untuk tahun 2005-2014 seperti tabel 5.5.

Tabel 5.5. Pendapatan Asli Daerah, Total Penerimaan Transfer dan rasio Tingkat Kemandirian Daerah Kota Jambi tahun 2005 s/d 2014 (Juta rupiah)

No	Tahun	PAD	TPT	TKD	Kesimpulan	Pola
1	2005	35.948	279.976	12,84	Tidak mampu	Intruktif
2	2006	43.323	400.017	10,83	Tidak mampu	Intruktif
3	2007	45.525	455.408	10,00	Tidak mampu	Intruktif
4	2008	55.671	501.409	11,10	Tidak mampu	Intruktif
5	2009	68.105	498.424	13,66	Tidak mampu	Intruktif
6	2010	78.355	571.023	13,72	Tidak mampu	Intruktif
7	2011	99.000	765.781	12,93	Tidak mampu	Intruktif
8	2012	113.090	903.954	12,51	Tidak mampu	Intruktif
9	2013	149.042	1.005.079	14,83	Tidak mampu	Intruktif
10	2014	175.133	857.255	20,53	Tidak mampu	Intruktif

Sumber : Kota Jambi dalam angka Data diolah

Berdasarkan tabel 5.5. dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Jambi dalam berotonomi selama tahun 2005-2014. Selama periode tersebut tingkat Kemandirian keuangan daerah Kota Jambi semuanya rendah sekali (tidak mampu), dengan pola hubungan instruktif. Ini berarti bahwa kemampuan PAD untuk menopang pendanaan pembangunan pada Kota Jambi belum mampu untuk berotonomi. Kota Jambi tersebut masih sangat tergantung pada dana transfer dari

pusat dan provinsi. Untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, maka Kota Jambi harus semaksimal mungkin meningkatkan PAD-nya.

Kemandirian keuangan daerah Kota Jambi dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih sangat rendah. Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Jambi untuk DOF hanya berkisar antara 10,00% sampai 20,53%, artinya pola hubungan yang instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini disebabkan betapa dominannya transfer dari pemerintah pusat dalam APBD melalui dana perimbangannya.

1.4.1.3 Tingkat Ketergantungan daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah merupakan rasio dari penerimaan transfer terhadap total penerimaan daerah, semakin besar nilai dari tingkat ketergantungan daerah menunjukkan daerah tersebut belum mampu membiayai belanja daerahnya sendiri dan masih tergantung dari pemerintah pusat, hal ini menunjukkan belum mandirinya daerah tersebut, dan semakin kecil rasio tingkat ketergantungan daerah menunjukkan semakin mandirinya suatu daerah tersebut dalam membiayai belanjanya. Adapun tingkat ketergantungan daerah Kota Jambi seperti tabel 5.6.

Tabel : 5.6. Rata-rata Penerimaan Transfer, Total Pendapatan Daerah dan Tingkat Ketergantungan Daerah Kota Jambi tahun 2005 - 2014(Juta rupiah)

No	Tahun	PT	TPD	TKtD	Kesimpulan
1	2005	279.976	334.670	83,66	Buruk sekali
2	2006	400.017	466.481	85,75	Buruk sekali
3	2007	455.408	522.838	87,10	Buruk sekali
4	2008	501.409	608.555	82,39	Buruk sekali
5	2009	498.424	603.350	82,61	Buruk sekali
6	2010	571.023	766.321	74,51	Kurang baik
7	2011	765.781	869.967	88,02	Buruk sekali
8	2012	903.954	1.083.917	83,40	Buruk sekali
9	2013	1.005.079	1.164.353	86,32	Buruk sekali
10	2014	857.255	1.220.463	70,24	Kurang baik

Sumber : Kota Jambi dalam angka Data diolah

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa tingkat ketergantungan Daerah Kota Jambi terendah dengan kriteria kurang baik terjadi pada tahun 2014 sebesar 70,24% dan tahun 2010 sebesar 74,51 pada periode selain pada itu tingkat ketergantungan

daerah dengan kriteria buruk sekali dan yang terparah terjadi pada tahun 2011 sebesar 88,02%; ini menunjukkan ketergantungan fiskal sangat besar yang berarti kinerja anggaran sangat buruk sekali.

Tingkat ketergantungan Kota Jambi berdasarkan kriteria rasio ketergantungan menurut ketentuan Depdagri, bahwa kemampuan keuangan daerah sangat buruk sekali. Diasumsikan bahwa pemerintah daerah belum mampu membiayai pembelanjanya, atau dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini disebabkan dominannya transfer dari pemerintah pusat dalam APBD melalui dana perimbangan.

Kondisi pemerintah daerah melalui rasio ketergantungan sudah selayaknya mengupayakan penerimaan lebih besar lagi, terutama melalui PAD dan komponen-komponennya. Perlunya intensifikasi pada sisi penerimaan pajak, investor, dan efisiensi serta efektivitas pada sisi pembelanjaan pada kegiatan yang menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Struktur PAD Kota Jambi menunjukkan pajak daerah memberikan peran yang besar dalam pembentukan PAD. Dilihat dari struktur komposisi APBD, peran PAD dalam membiayai belanja daerah masih sangat kecil, Daerah masih sangat tergantung pada dana perimbangan, sehingga daerah belum mandiri dalam membiayai sendiri belanja daerahnya.
2. Indek Kemampuan Keuangan Kota Jambi dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan hal ini menunjukkan di Kota Jambi telah terjadi peningkatan kemampuan keuangan daerah.
3. Tingkat Kemandirian keuangan daerah Kota Jambi rendah sekali (tidak mampu), dengan pola hubungan instruktif dan tingkat ketergantungan Daerah Kota Jambi menunjukkan ketergantungan fiskal sangat besar ini artinya kemampuan PAD untuk menopang pendanaan pembangunan pada Kota Jambi belum mampu untuk berotonomi, masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi. Untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, maka Kota Jambi harus semaksimal mungkin meningkatkan PAD-nya.

Saran

1. Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun APBD hendaknya dapat memberikan proporsi yang lebih besar pada belanja modal, sehingga dalam jangka panjang dapat menimbulkan iklim investasi yang lebih baik lagi.
2. Keberadaan PAD hendaknya dipahami sebagai hasil ikutan dari tumbuhnya investasi di daerah. Dengan demikian kebijakan peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan kepentingan jangka panjang yang berdampak lebih luas yaitu investasi sektor swasta.



DAFTAR PUSTAKA

- Deddyk. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Halim, A., 2001, “*Anggaran Daerah dan Fiscal Stress : Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia*”, *JEBI Vol. 16, No. 4, 2001*.
- Lewis, B.D., 2003. *Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia*. Research Triangle Institute. North Carolina. Working Paper.
- Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002*.
- Susilo, G..T.B., P.H.A., 2007. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.